

NEWSLETTER

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM KOTAKU TANJUNG JABUNG BARAT

EDISI JULI 2021



Pelindung :

Pokja PKP Kaupaten tanjung Jabung Barat

Pembina :

Kabid Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penanggung Jawab :

TA. Kominikasi KMW OC-3 Jambi

Pimpinan Redaksi :

Askot Mandiri
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tim Kreatif :

Tim Fasilitator
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Desain : Salam, Gunanda

Bendahara : Suci

Alamat Redaksi :

Kantor Askot Mandiri
Jl. Jendral Sudirman, Gg Musi RT. 005
Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Telp/HP : 0857-8392-2195

Email :
askotmandiritanjabbarat@gmail.com

Instagram : kotaku_tanjab_barat



Ground Breaking program Kotaku Tahun 2021 oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Kepala BPPW Provinsi Jambi dan Anggota DPR RI komisi V Dapil, Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan sosialisasi masal. Dikesempatan tersebut Bupati juga menandatangani prasasti peresmian program Kotaku.





Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag menyampaikan sambutan dalam Groundbreaking Kotaku.



Kepala BPPW Provinsi Jambi, Ir. Azna Legawati, MM menyampaikan sambutan dalam Groundbreaking Kotaku.



Anggota DPR-RI Komisi V, H.A. Bakri, HM, SE menyampaikan sambutan dalam Groundbreaking Kotaku.



Ketua BKM Kelurahan Kampung Nelayan menyampaikan sambutan dalam Groundbreaking Kotaku.



Bupati Tanjung Jabung Barat menandatangani Prasasti peresmian Kotaku Kelurahan Kampung Nelayan 2021



SOSIALISASI MASAL DAN GROUND BREAKING KOTAKU TAHUN 2021

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Kepala BPPW Provinsi Jambi dan Anggota DPR RI Komisi V Dapil Jambi melaksanakan kegiatan Groundbreaking atau peletakan batu pertama serta penandatanganan prasasti peresmian sebagai penanda dimulainya pelaksanaan kegiatan program Kotaku di Kelurahan Kampung Nelayan.

Kegiatan yang diselenggarakan secara paralel dengan pelaksanaan sosialisasi masal ini juga dihadiri Forkompimda kabupaten Tanjung Jabung Barat, Camat, Lurah Tokoh masyarakat dan fasilitator pendamping program Kotaku.

Rangkaian acara pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk penandatanganan prasasti, peletakan batu pertama, sambutan para pihak dan kunjungan lapangan, dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pemahaman secara luas program Kotaku ke masyarakat di Kelurahan Kampung Nelayan, khususnya dalam pelaksanaan BPM regular tahun 2021.

Dalam sambutannya H. A. Bakri, HM, SE selaku anggota DPR RI Komisi V berpesan

agar pelaksanaan program ini melibatkan warga setempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, beliau juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program ini di kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan.

Kepala BPPW Provinsi Jambi Ir. Azna Legawati, MM menyampaikan dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial pada pandemi covid 19, disamping dapat upah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan masyarakat juga dapat manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan.

Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih pada para pihak dan menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program.

Ketua BKM Kelurahan Kampung Nelayan M. Salim menyampaikan ucapan terimakasih atas terlaksananya program ini berharap dukungan pemerintah dalam mengatasi persoalan kumuh di kelurahan kampung nelayan baik dalam skala lingkungan maupun kawasan.



Kepala Dinas Perkim, Yon Heri, SP, MM menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan Groundbreaking.

"Pada tahun 2021 akan dilakukan studi di tiga wilayah teridentifikasi kumuh yaitu di Kelurahan Teluk Nilau, Tebing Tinggi dan Merlung, dengan adanya penambahan tersebut tentu akan menambah luasan kumuh di Tanjung Jabung Barat,

Kedepan Kami berkomitmen untuk menyusun perubahan dan penyempurnaan dokumen RP2KPKP serta rencana aksi terpadu dalam menangani wilayah kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Kadis Perkim)

SOSIALISASI PROGRAM KOTAKU KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN TAHUN 2021

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. (Sutarya, 2004)

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program.

Sosialisasi bisa dilakukan kapanpun, di manapun dan kepada siapapun, tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan kepada siapa sosialisasi dilakukan.

Dalam pelaksanaan program Kotaku tahun 2021, Kelurahan Kampung Nelayan melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi, yakni (1) sosialisasi tingkat Kelurahan, (2) sosialisasi tingkat basis, (3) sosialisasi masal dan (4) pengembangan media sosialisasi berupa pemasangan spanduk yang dilaksanakan pada rentang waktu Juni dan Juli 2021.

Disamping media sosialisasi (Spanduk) juga dilakukan mengembangkan media sosialisasi lain berupa leaflet dengan tema BPM tahun 2021 dan rencana penataan lingkungan (RPLP) Kelurahan Kampung Nelayan. yang



diberikan kepada masyarakat sebagai media untuk lebih mengenal program kotaku, dan stiker logo program Kotaku yang ditempelkan di rumah warga dan tempat umum. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut dapat mening-

katkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan BPM regular 2021 serta membangun kesadaran akan pentingnya kolaborasi, partisipasi dan keberlanjutan program Kotaku di Kelurahan Kampung nelayan.



SOSIALISASI TINGKAT KELURAHAN



SOSIALISASI TINGKAT BASIS



SOSIALISASI MASAL

PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT (PKM)

Dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan Program Kotaku menempatkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sebagai unsur utama pelaksana program, dimana masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemanfaat, namun juga menempatkan masyarakat sebagai perencana dan pelaksana program, melakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap hasil kegiatan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, perlu dilakukan pengorganisasian kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat (PKM), melalui kegiatan pelatihan

Beberapa jenis kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan Kelurahan Kampung Nelayan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut : (1) Pelatihan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), (2) Pelatihan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), (3) Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), (4) Pelatihan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), (5) Pelatihan Pembuatan kerupuk udang untuk kegiatan Open Menu dan (6) Sertifikasi Tukang.

Pasca pelaksanaan pelatihan Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami dan melaksanakan program Kotaku.



Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

"Pengembangan Kapasitas dalam KOTAKU merupakan salah satu pilar penting, karena merupakan sistem yang akan menghantarkan tercapainya tujuan program. Pengembangan kapasitas bertujuan membangun gerakan Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan ditingkat Kota/kabupaten dan Kelurahan/Desa. Kegiatan pengembangan kapasitas dalam KOTAKU dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu Pelatihan dan sosialisasi "

DOKUMENTASI PELATIHAN



Pendampingan terhadap BKM dan KSM pasca pelatihan

PENDAMPINGAN PASCA PELATIHAN

" Peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya persoalan kemampuan secara teknis dalam melaksanakan program. Lebih jauh peningkatan kapasitas harus mampu membangun kesadaran aktif, dan kesefahama bersama serta komitmen untuk mengatasi masalah di lingkungannya".

Oleh karenanya peningkatan kapasitas akan terus dilakukan melalui kegiatan pendampingan masyarakat dan kelembagaan, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik.



KEGIATAN BPM 2021 KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN

"Infrastruktur Skala Lingkungan adalah infrastruktur tersier yang diusulkan, direncanakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat secara swakelola melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditingkat Kelurahan/Desa."

Sebagai salah satu kelurahan yang masuk dalam kriteria kumuh, kelurahan Kampung Nelayan pada tahun 2021 ini memasuki tahun ke 2 dalam menerima alokasi BPM dan melaksanakan program KOTAKU.

Tapi tentu saja persoalan kumuh yang sangat kompleks di Kampung Nelayan belumlah usai, masih banyak persoalan kumuh yang dihadapi dan perlu penanganan seperti kepadatan dan ketidak teraturan bangunan rumah pada areal permukiman dan rawan terhadap bahaya kebakaran, minimnya ketersediaan air bersih, tidak tersedianya sanitasi pembuangan limbah, sampah dan genangan air di areal permukiman.

Masih terdapat jalan-jalan lingkungan yang kurang memadai, dan tidak dilengkapi saluran drainase bahkan cenderung tidak memiliki sempadan dengan bangunan rumah dan ketika terjadi air laut pasang banyak jalan yang tergenang.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kumuh di Kelurahan Kampung Nelayan, melalui program Kotaku dilaksanakan pembangunan infrastruktur Jalan Rigid Beton sepanjang 1.579,9 m dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.000.000.000,- yang bersumber dari bantuan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.



Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan konstruksi beton melalui program Kotaku, di harapkan dapat mengurangi luasan kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kelurahan Kampung Nelayan



MONITORING DAN EVALUASI

MONITORING EVALUASI

" PP Nomor 39 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan. Sedangkan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar".

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atau yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.

Monev bertujuan untuk Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, untuk itu diperlukan tindakan pemantauan atas penggunaan anggaran yang dikelola serta pekerjaan yang dilakukan. Dan untuk menginventarisir faktor – faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan selanjutnya

Salah satu bentuk kegiatan monev adalah kunjungan untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Monev lapangan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila



Monitoring Kegiatan bersama staf Dinas Perkim



UJI HAMERTEST

Untuk memastikan bahwa kualitas kegiatan prasarana yang dilakukan telah sesuai ketentuan, tim fasilitator bersama BKM dibantu Tim Korkot 2 Muaro Jambi melakukan opname dan uji hamertest yang difasilitasi dinas Perkim Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Uji hamertest ini dilakukan untuk memeriksa keseragaman kualitas beton pada struktur dan mendapatkan perkiraan kuat tekan beton pada lokasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melakukan 10 kali sample tembakan hamer test di daerah pengujian seluas 20 X 20 cm di setiap kelipatan STA 25.

Hasil dari uji hamertest yang dilakukan mengisyaratkan bahwa kuat tekan beton yang telah dilaksanakan berada pada angka 22 – 45 MPA





AWASI BANTUAN UNTUK MASYARAKAT AGAR TUNTAS KUMUH DAN TEPAT SASARAN



KOTAKU NASIONAL | KOTAKU NASIONAL | KOTAKUNASIONAL | SMS/WA PIM: 0817 1480 48 | kotakupr.go.id

PENANGANAN MASALAH



Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka munculah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving.

Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program di komunitas akan ditemui permasalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan.

Begitupun halnya dengan pelaksanaan kegiatan di kelurahan Kampung Nelayan. Meskipun kegiatan ditahun pertama dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman berharga bagi pelaku program, namun dalam konteks pemberdayaan tidak serta merta kita dapat mengatakan bahwa tugas pemberdayaan telah selesai dan mengklaim masyarakat telah berdaya dan mampu melaksanakan program atau dapat mengatasi

persoalannya secara mandiri.

Mengingat pemberdayaan adalah proses transformatif yang dilakukan secara partisipatif dan berkesinambungan, maka fungsi fasilitator dalam melakukan kegiatan fasilitasi tentunya masih sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran kritis serta perubahan sikap dan perilaku.

Dalam pelaksanaannya hingga memasuki minggu ke 2 Juni berdasarkan hasil uji silinder lanjutan diketahui bahwa fc 20 kembali tidak memenuhi standart teknis, oleh karenanya tim fasilitator memutuskan untuk mengkoordinasikan hal tersebut pada BKM dan secara bersama disepakati untuk menghentikan kegiatan sementara waktu.

Point pentingnya disini adalah keputusan tegas penghentian kegiatan sementara waktu untuk selanjutnya melakukan diskusi antara Tim Fasilitator, BKM, KSM, Relawan dan Pekerja, dalam diskusi tersebut tim fasilitator menyampaikan hasil uji silinder lanjutan yang tidak memenuhi standart teknis, untuk selanjutnya mengajak pelaku program melakukan analisa yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya standart teknis tersebut.

Beragam kemungkinan yang menjadi penyebab di utarakan dan dicatat, mulai dari, jenis dan kualitas material terutama Pasir, komposisi campuran material (semen, pasir, batu split dan termasuk penggunaan air) serta proses pengadukan material.

Setelah melalui serangkaian analisa dan diskusi disepakati agar KSM dapat

memastikan material pasir yang didatangkan oleh toko adalah pasir kasar.

Selanjutnya tim fasilitator menjelaskan kembali pada pelaku program khususnya tugas BKM dan KSM dalam mewujudkan infrastruktur dengan kualitas baik sesuai persyaratan dan standar teknis infrastruktur yang ditetapkan.

Sebagai wujud transformasi pengetahuan tim fasilitator kembali menjelaskan tentang komposisi penggunaan material, penggunaan media untuk mengukur jumlah komposisi dan teknis pengadukan material.

Strategi pemecahan masalah yang tepat merupakan pendekatan terstruktur untuk mengatasi masalah dan dapat mengarahkan ke solusi terbaik. Pendekatan ini memberikan sense of control dan prediktabilitas yang lebih akurat dalam menangani masalah.

Berikut adalah langkah-langkah strategi pemecahan masalah efektif yang dapat diterapkan:

- 1) Identifikasi masalah,
- 2) Analisis masalah,
- 3) Brainstorming berbagai macam solusi
- 4) Mengambil keputusan terkait solusi yang tepat



" semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, maupun temuan—temuan berdasarkan hasil pengamatan atau pemantauan akan selalu dibicarakan bersama pelaku program untuk dicari solusinya."

CATATAN KRITIS KOLABORASI



Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi ini semakin diperparah dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta norma, nilai, sikap dan perilaku yang dianut di komunitas masyarakat tersebut.

Untuk menangani persoalan kumuh, program KOTAKU yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh

baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan menginisiasi pembangunan dengan platform kolaboratif yang melibatkan para pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat.

Mengapa harus dengan platform kolaboratif, karena pemerintah sadar akan keterbatasannya dalam menangani kawasan kumuh sehingga perlu dukungan para pihak untuk mengatasinya secara bersama.

Namun tentu saja tidak mudah membangun kolaborasi, sebab dibutuhkan kesefahaman, kepercayaan dan komitmen bersama dalam menangani permasalahan kumuh.

Makna kolaborasi ditingkat masyarakat dapat diukur dari sejauh mana keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran, waktu, tenaga dan pembiayaan disemua tahapan program, mulai dari tahap

persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan.

Guna mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, maka kunci utamanya terletak pada proses komunikasi dan sosialisasi serta pendampingan yang dilakukan.

Kegagalan dalam melaksanakan proses sosialisasi maupun peningkatan kapasitas mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pada tingkatan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten, persoalan membangun kolaborasi justru terlihat lebih rumit.

Masih kuatnya ego sektoral mengakibatkan tidak terjalinnya sinergi program baik antar kementerian dan lembaga maupun pada Dirjen dalam satu Kementerian yang sama. Begitupun halnya pada level pemerintah daerah.

Tidak adanya penjelasan rinci mengenai batasan peran, fungsi serta tanggung jawab dalam pembagian urusan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) bidang PKP berdasarkan luasan kumuh sebagaimana diamanatkan UU No 23 tahun 2004 mengakibatkan tidak optimalnya penanganan kumuh berdasarkan penafsiran batasan kewenangan.

Tentu saja masih banyak banyak persoalan dan hambatan dalam membangun kolaborasi dalam penanganan kumuh baik secara internal pada tataran pemerintah maupun eksternal ditingkat masyarakat, perguruan tinggi dan swasta.

Sepanjang adanya kesefahaman bersama, terbangunnya kepercayaan dan kuatnya komitmen para pihak dalam penanganan kumuh maka tujuan penggunaan Satu data, satu peta dan satu perencanaan menuju kota layak huni dan berkelanjutan akan dapat terwujud.

SEMANGAT SEHAT, BEBAS DARI COVID-19



Ingat selalu:

5M

MEMAKAI MASKER



MENCECOK TANGAN



MENJAGA JARAK



MEMBATASI MOBILITAS



MENDIINDAH KECAMUKAN



 [kotakunasional](#)
 [kotaku.nasional](#)
 [kotaku nasional](#)
 [kotakunasional](#)

8 | Newsletter